PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

ARTIKEL JURNAL

I WAYAN YADI WARDANA
NIM: D02419004

FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

I Wayan Yadi Wardana[1], Rusly Abdurrahman Idji[2], Widya Kurniati Mohi[3]

[123)] Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023

Email: iwayanyadi15@gmail.com

ABSTRACT

I WAYAN YADI WARDANA. Community Participation in Development in Huntu selatan Village, Bolango Selatan District, Bone Bolango Regency. Supervisor I is RUSLY ABDURRAHMAN IDJI and Supervisor II is WIDYA KURNIATI MOHI.

This research aims to obtain an overview of how community participation in development in Huntu Selatan Village, Bolango Selatan District, Bone Bolango Regency, uses a qualitative research method using a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The results showed Community participation in programs and projects is optimal, carried out through deliberations at the hamlet level which are followed by village deliberations which are attended by community leaders, religious leaders, RT / RW, sub-district government along with BPD or LPM in the context of excavations. idea. From exploring these ideas, the problems that exist in the village can be identified. Likewise, community participation in taking benefits is optimal, the community is more involved voluntarily, giving themselves directly in helping with all things related to development to support the implementation of development in the form of energy, goods, materials, thoughts or information that is useful for implementing development. Furthermore, participation in decision making is not optimal, this can be seen from the level of community participation in attending meetings, the community is more concerned with their own affairs such as going to the fields or gardens, as well as the level of community participation in monitoring is not yet optimal, the community still thinks that village development is entirely the responsibility of the village government. Thus it can be concluded that community participation in development in Huntu Selatan Village, Bolango Selatan District, Bone Bolango Regency is quite good, but it cannot be said to be implemented optimally.

Keywords: Participation, Community, Development

ABSTRAK

I WAYAN YADI WARDANA. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Pembimbing I RUSLY ABDURRAHMAN IDJI dan Pembimbing II WIDYA KURNIATI MOHI.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam program dan proyek yang sudah optimal, dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah kelurahan beserta BPD atau LPM dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa. Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat sudah optimal, masyarakat lebih terlibat secara sukarela, memberi diri secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan guna menunjang pelaksanaan pembangunan baik berupa tenaga, barang, material, pikiran ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, Partisipasi dalam pengambilan keputusan belum optimal, hal ini bisa dilaihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat, masyarakat lebih mementingkan urusannya masing – masing seperti pergi kesawah atau kebun, begitupula dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal, masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan desa sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah desa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik namun belum dapat dikatakan terlaksana dengan optimal.

Kata Kunci : Partisipasi,Masyarakat ,Pembangunan

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah Kota maupun Perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Program - program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan berjalan seperti yang kita harapakan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang berkaitan langsung dengan hakikat Demokrasi sebagai system pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapatan dalam pembuatan kebiakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam

pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat yakni salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan Desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan Desa atau kelurahan merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama, yang kedua Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan Desa yang dianut dalam UU No. 9/2015 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas

mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak Nasional.

Kemudian adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal Desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Partisipasi dalam hal pembangunan Desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendri maka suatu pembangunan tidak dapat dikatakan sempurna. Berhubungan dengan hal tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal ini. Terutama dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam pembangunan fisik banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal gotongroyong untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Huntu Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai kesemapatan, seperti melaluai pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan dalam proses pembangunan. Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikiran dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Huntu Selatan dalam pembangunan dalam bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian deskriptif. pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan dan dilakukan oleh imforman atau sumbar data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya data yang diperoleh berdasarkan gejala sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang di alami, disarankan dan difikirkan oleh informan/partisipan.

Sumber data pada penelitian ini berupa hasil natural/situasi ilmiah, wajar tanpa rekayasa. Peneliti mencari informasi dari orang-orang dan dokumen tepat yang berada dalam lingkup situasi ilmiah tersebut. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data sebelum memasuki lapangan yaitu analisis data studi pendahuluan atau, data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian analisis yang digunakan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan data reduksi, penyajian data dan verifikasi data *(conclusion drawing)*.

Dalam mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

HASIL PENELITIAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Conyers (1982) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri lihat (Supriatna, 2000).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi Didalam Nalis Dapla dkk (2007) adalah keikutsertaan masyarakat masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketrlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan Desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi fiscal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat Desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi sangat penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang disarankan oleh individu maupun masyarakat.

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau atau ide yang menyangkut kepentingan Bersama.

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program tawaran.

Berdasarkan hasil observasi masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dari hasil wawancara dengan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat dapat di simpulkan bahwa Partisipasi dalam pengambilan keputusan belum optimal, masyarakat lebih memilih pergi ke pasar atau ke kerja di sawah dairpida ikut terlibat berpartisipasi dalam rapat pengambilan keputusan.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program Dan Proyek

Partisipasi ini meliputi sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Berdasarkan hasil observasi masih kurangnya keterlibatan masyarakat pelaksanaan program dan proyek, dari hasil wawancara dengan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat dapat di simpulkan bahwa pelibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Program atau Proyek sudah optimal, dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah kelurahan beserta BPD atau LPM dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas bisa dilihat dari output, sedangkan kuantitas bisa dilihat dari persentase keberhasilan program.

Berdasarkan hasil observasi masyarakat kurang berpartisipasi dalam melakukan kerja bakti, dari hasil wawancara dengan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat dapat di simpulkan bahwa Partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan manfaat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat sudah optimal yaitu dengan, keterlibatan secara sukarela, memberi diri secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan guna menunjang pelaksanaan pembangunan baik berupa uang, tenaga, barang, material, pikiran ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

4. Partisipasi Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Pertisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah dirancanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dengan masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dari hasil wawancara dengan kepala desa dan tokoh masyarakat belum optimal disebabkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang, masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan di desa sepenuhnya adalah tanggungjawab pemerintah desa.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam program dan proyek yang sudah optimal, dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah kelurahan beserta BPD atau LPM dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa

Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat sudah optimal, masyarakat

lebih terlibat secara sukarela, memberi diri secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan guna menunjang pelaksanaan pembangunan baik berupa tenaga, barang, material, pikiran ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, Partisipasi dalam pengambilan keputusan belum optimal, hal ini bisa dilaihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat, masyarakat lebih mementingkan urusannya masing – masing seperti pergi kesawah atau kebun, begitupula dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal, masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan desa sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah desa.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik namun belum dapat dikatakan terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas maka sangat penting bagi penulis untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat, agar supaya lebih meningkatkan lagi partisipasinya dalam hal pembangunan, karena pembangunan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan seluruh komponen masyarakat oleh karena itu, supaypembangunan dapat berjalan dengan baik peran daripada masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan.
2. Kepada pemerintah desa agar supaya melaksanakan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia di bidang manajemen kepada aparat desa, LPM maupun tokoh-tokoh masyarakat
3. Kepada pemerintah desa agar supaya melaksanakan pelatihan peningkatan sumberdaya di bidang hukum kepada aparat desa, LPM maupun tokoh-tokoh masyarakat A

DAFTAR PUSTAKA

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural

development: Seeking clarity through specificity. World Development, Vol 8(3), 213–235.

Conyers, Diana, 1982, *An Introduction to Social Planning in The Third World*, John Willey and Son's: New York.

Dalpa Nalis dkk. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_Tahun_2005

Supriatna, Tjahya, 2000, *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora: Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa https://www.bphn.go.id/data/documents/79uu005.pdf